

**PROSES KOLABORASI PEMERINTAH DESA
DALAM MENDORONG *COLLABORATIVE*
*GOVERNANCE***

**(STUDI PADA KEBUN WAK INGGI DESA PAREREJO KECAMATAN
PURWODADI KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR)**

SKRIPSI



OLEH:

**NADHIFA TRI RAHMADINA
NPM 22201091060**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2026**

RINGKASAN

Nadhifa Tri Ramadina, 2026, **Proses Kolaborasi Pemerintah Desa Dalam Mendorong Collaborative Governance (Studi Pada Kebun Wak Inggi Desa Parerejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur)**. Prof. H. Yaqub Cikusin, M.Si., dan Dr. Didik Supriyanto, S.Sos., S.T., M.Si. Jumlah kata (23899), jumlah halaman arab (137), jumlah halaman romawi (xxiv).

Pengelolaan wisata desa membutuhkan keterlibatan berbagai aktor agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Kebun Wak Inggi di Desa Parerejo merupakan salah satu bentuk pemanfaatan potensi desa yang dikembangkan melalui kerja sama antara pemerintah desa, pengelola, dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, proses kolaborasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *collaborative governance* yang menekankan kesetaraan peran, dialog deliberatif, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaborasi Pemerintah Desa Parerejo dalam mendorong *collaborative governance* pada pengelolaan Kebun Wak Inggi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa Parerejo, pengelola Kebun Wak Inggi, serta masyarakat yang terlibat maupun merasakan dampak dari pengelolaan wisata desa. Analisis data dilakukan dengan tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis dalam penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* oleh Ansell dan Gash (2007), yang meliputi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, serta dampak sementara (*intermediate outcomes*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam pengelolaan Kebun Wak Inggi telah berjalan dan melibatkan berbagai aktor, namun masih didominasi oleh peran pemerintah desa sebagai pengambil keputusan utama. Dialog antar aktor telah dilakukan, tetapi belum bersifat deliberatif dan terstruktur. Kepercayaan dan komitmen antar pihak telah terbentuk, namun masih bersifat informal dan belum dilembagakan. Dampak sementara dari kolaborasi terlihat pada perubahan pola kerja yang lebih terarah serta terciptanya hubungan kerja yang harmonis, meskipun dampak ekonomi belum signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tujuan penelitian telah tercapai dan proses kolaborasi menunjukkan arah yang positif, tetapi masih memerlukan penguatan agar *collaborative governance* dapat berjalan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Collaborative Governance; Pemerintah Desa; Kolaborasi; Wisata Desa; Kebun Wak Inggi; Ansell dan Gash*

SUMMARY

Nadhifa Tri Rahmadina, 2026, **The Collaboration of Village Government in Promoting Collaborative Governance: A Case Study of Kebun Wak Inggi, Parerejo Village, Purwodadi Subdistrict, Pasuruan Regency, East Java Province**. Prof. Dr. H. Yaqub Cikusin, M.Si., and Dr. Didik Supriyanto, S.Sos., S.T., M.Si. Word Count (23899), Number of Arabic (137), Number of Roman pages (xxiv).

Village tourism management requires the involvement of multiple actors to ensure sustainability. Kebun Wak Inggi in Parerejo Village represents an effort to utilize local potential through collaboration between the village government, site managers, and the community. However, in practice, the collaboration process has not fully reflected the principles of collaborative governance, which emphasize equality among actors, deliberative dialogue, and active participation of all stakeholders. Therefore, this study aims to analyze the collaboration process of the Parerejo Village Government in promoting collaborative governance in the management of Kebun Wak Inggi.

This study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Research informants included the Head of Parerejo Village, the manager of Kebun Wak Inggi, and community members involved in or affected by village tourism management. Data analysis was conducted through data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The analytical framework is based on the Collaborative Governance theory proposed by Ansell and Gash (2007), which includes face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, and intermediate outcomes.

The results indicate that the collaboration process in managing Kebun Wak Inggi has been implemented and involves various actors; however, it remains dominated by the village government as the primary decision-maker. Dialogue among actors has occurred but has not yet developed into a structured and deliberative forum. Trust and commitment have been established but remain informal and have not been institutionalized. Intermediate outcomes are reflected in more organized management practices and more harmonious working relationships, although economic impacts are still limited. This study concludes that the research objectives have been achieved, and while the collaboration process shows positive progress, further strengthening is required to ensure the effective and sustainable implementation of collaborative governance.

Keywords: *Collaborative Governance; Village Government; Collaboration; Village Tourism; Kebun Wak Inggi; Ansell and Gash.*

BAB I

PENDAHULUAN

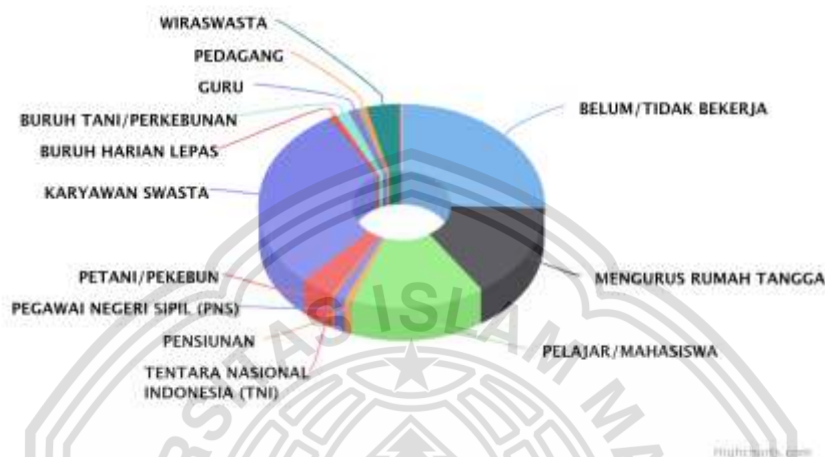
1.1. Latar Belakang

Desa Parerejo, yang terletak di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, merupakan salah satu desa di Jawa Timur yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian melalui Kebun Wak Inggi. Kebun ini tidak hanya berfungsi sebagai lahan agribisnis untuk produksi tanaman lokal seperti sayuran dan buah-buahan, tetapi juga sebagai wahana edukasi bagi masyarakat dan wisatawan serta destinasi wisata pertanian yang menarik. Namun, pengelolaannya menghadapi berbagai permasalahan aktual, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam manajemen kebun, minimnya koordinasi antar-stakeholder yang melibatkan pemerintah desa, masyarakat, dan pihak swasta, serta rendahnya partisipasi masyarakat akibat kurangnya kesadaran akan manfaat kolaborasi. Hal ini tercermin dari laporan kegiatan desa yang menunjukkan bahwa produktivitas kebun belum optimal, dengan partisipasi masyarakat hanya sekitar 30% dalam kegiatan pengelolaan (Desa Parerejo, 2023).

Selain itu, peran pemerintah desa dalam mengelola kolaborasi multipihak belum optimal, di mana inisiatif sering kali terhenti pada tahap perencanaan tanpa implementasi yang efektif. Fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam tata kelola desa untuk memaksimalkan potensi Kebun Wak Inggi sebagai sumber ekonomi lokal. Data dari survei awal di desa tersebut mengungkapkan bahwa 60% responden masyarakat merasa kurang terlibat dalam pengambilan

keputusan terkait kebun, yang mengindikasikan adanya kesenjangan dalam partisipasi.

Gambar 1.1. Diagram Demografi Berdasar Pekerjaan



Sumber: Website Desa Parerejo.com, 2025

Gambar 1.2. Screenshot Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	1839	25,51%	886	12,29%	953	13,22%
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	1089	15,11%	1	0,01%	1088	15,09%
3	PELAJAR/MAHASISWA	1083	15,02%	571	7,92%	512	7,10%
4	PENSIUNAN	63	0,87%	37	0,51%	26	0,36%
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	77	1,07%	51	0,71%	26	0,36%
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	22	0,31%	22	0,31%	0	0,00%
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	13	0,18%	11	0,15%	2	0,03%
8	PERDAGANGAN	6	0,08%	4	0,06%	2	0,03%
9	PETANI/PEKEBUN	272	3,77%	158	2,19%	114	1,58%
15	KARYAWAN SWASTA	2144	29,74%	1506	20,89%	638	8,85%
16	KARYAWAN BUMN	3	0,04%	1	0,01%	2	0,03%
17	KARYAWAN BUMD	1	0,01%	0	0,00%	1	0,01%
18	KARYAWAN HONORER	7	0,10%	4	0,06%	3	0,04%
19	BURUH HARIAN LEPAS	53	0,74%	38	0,53%	15	0,21%
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	106	1,47%	57	0,79%	49	0,68%

23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	3	0,04%	0	0,00%	3	0,04%
26	TUKANG BATU	4	0,06%	4	0,06%	0	0,00%
27	TUKANG KAYU	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
30	TUKANG JAHIT	3	0,04%	0	0,00%	3	0,04%
42	PENDETA	4	0,06%	2	0,03%	2	0,03%
44	WARTAWAN	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
64	DOSEN	1	0,01%	1	0,01%	0	0,00%
65	GURU	56	0,78%	20	0,28%	36	0,50%
72	DOKTER	2	0,03%	1	0,01%	1	0,01%
73	BIDAN	2	0,03%	0	0,00%	2	0,03%
74	PERAWAT	6	0,08%	1	0,01%	5	0,07%
81	SOPIR	11	0,15%	11	0,15%	0	0,00%
84	PEDAGANG	55	0,76%	36	0,50%	19	0,26%
85	PERANGKAT DESA	2	0,03%	2	0,03%	0	0,00%
88	WIRASWASTA	260	3,61%	196	2,72%	64	0,89%
89	LAINNYA	19	0,26%	12	0,17%	7	0,10%
	JUMLAH	7208	100,00%	3635	50,43%	3573	49,57%
	BELUM MENGISI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	TOTAL	7208	100,00%	3635	50,43%	3573	49,57%

Selengkapnya... Tampilkan Nol
Diperbarui pada : 12 Juli 2025

Sumber: Website Desa Parerejo.com, 2025

Berdasarkan data kependudukan Desa Parerejo, jumlah penduduk mencapai 7.208 jiwa, terdiri dari 3.635 laki-laki dan 3.573 perempuan. Komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan menunjukkan bahwa 1.839 orang (25,51%) tergolong sebagai belum atau tidak bekerja, dan 1.089 jiwa (15,11%) adalah masyarakat yang mengurus rumah tangga. Sementara itu, hanya 272 jiwa (3,77%) yang berprofesi sebagai petani/pekebun. Persentase petani ini tergolong sangat kecil dibandingkan total penduduk, bahkan sangat kontras dengan adanya aset desa berupa kebun seluas 7 hektare yang membutuhkan tenaga, kompetensi, dan partisipasi masyarakat untuk dikelola secara optimal.

Data ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja produktif di sektor pertanian masih sangat terbatas. Kondisi tersebut juga mempertegas temuan wawancara awal peneliti yang menyatakan bahwa pengelolaan Kebun Wak Inggi masih bergantung pada satu orang saja. Hal ini tampak dalam pernyataan oleh Bapak Abdul Jaeni sebagai pengelola kebun Wak Inggi menyampaikan, bahwasannya:

“soalnya aku aja mbak yang mengelola”. (Wawancara dengan Bapak Abdul Jaeni sebagai pengelola Kebun Wak Inggi Desa Parerejo, Rabu 19 November 2025).

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kebun belum melibatkan tenaga tambahan maupun partisipasi kolektif dari masyarakat desa. Keterbatasan SDM ini tentu mempengaruhi efektivitas pemeliharaan dan pengembangan kebun, terlebih dalam pekerjaan berat seperti proses penanaman atau perawatan intensif yang hanya terlaksana apabila terdapat program desa yang menyediakan tenaga kerja tambahan. Pengelola kebun menjelaskan bahwa aktivitas tersebut sangat bergantung pada ketersediaan dana desa, sebagaimana pengelola kebun Bapak Abdul Jaeni menyampaikan, bahwasannya:

“iki kan jagakno dana desa, dana desa mandek ya mandek (ini kan jagain dana desa, dana desa berhenti ya berhenti”. (Wawancara dengan Bapak Abdul Jaeni sebagai pengelola kebun Wak Inggi Desa Parerejo, Rabu 19 November 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut yang menandakan bahwa keberlanjutan aktivitas kebun masih terkait erat dengan kondisi pendanaan pemerintah desa. Selain itu, hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa

kewenangan terkait kemitraan dan kerja sama dengan pihak ketiga masih sepenuhnya berada pada Kepala Desa. Bapak Abdul Jaeni selaku pengelola kebun mengatakan:

“nek masalah detail kerjasama itu, ya pak kades... nek aku kan cuma pengelola,” (Wawancara dengan Bapak Abdul Jaeni sebagai pengelola kebun Wak Inggi Desa Parerejo, Rabu 19 November 2025).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa struktur kewenangan belum memberikan ruang partisipasi lebih luas bagi pengelola maupun masyarakat dalam proses peninjauan kolaborasi. Potensi kerja sama dengan sektor swasta atau pihak eksternal sebenarnya terbuka, namun pelaksanaannya masih bergantung pada inisiatif dan keputusan Kepala Desa, sebagaimana ditegaskan dalam hasil wawancara yang disampaikan Bapak Abdul Jaeni sebagai Pengelola Kebun mengatakan:

“itu ya pak kades yang punya wewenang... untuk menarik pihak ketiga” (Wawancara dengan Bapak Abdul Jaeni sebagai pengelola kebun Wak Inggi Desa Parerejo, Rabu 19 November 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi belum sepenuhnya terstruktur dan masih bersifat *top-down*, serta belum ada mekanisme formal yang mengatur peran setiap aktor dalam pengembangan kebun. Dalam wawancara tersebut juga terungkap bahwa Kebun Wak Inggi memiliki luas sekitar tujuh hektare yang didukung tiga sumber air, dua sumber dangkal dan satu sumur bor, yang sebenarnya menjadi modal kuat bagi pengembangan agribisnis desa. Namun, potensi besar tersebut belum dapat dioptimalkan akibat keterbatasan tenaga kerja, ketergantungan

pada pendanaan desa, serta belum berjalannya pola kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah desa, pengelola, masyarakat, dan pihak eksternal. Pengelola menuturkan bahwa terdapat wacana program keberlanjutan, namun belum terimplementasi secara strategis dan konsisten. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan *collaborative governance* sangat dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan pada satu aktor, memperluas partisipasi, serta memperkuat koordinasi lintas pihak dalam pengelolaan Kebun Wak Inggi. Data wawancara ini mempertegas urgensi pemerintah desa untuk membangun tata kelola kolaboratif yang mampu mengintegrasikan potensi agribisnis, edukasi, dan wisata secara berkelanjutan.

Konsep *collaborative governance* dalam tata kelola pemerintahan desa merujuk pada proses kerja sama multipihak antara pemerintah, masyarakat, kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku usaha dalam mendayagunakan sumber daya secara efektif. Menurut Ansell & Gash (2007), *collaborative governance* berlandaskan pada prinsip partisipasi, transparansi, kepercayaan, akuntabilitas, komunikasi dua arah secara peronal, tanggung jawab terhadap proses, serta tanggung jawab bersama (*shared responsibility*). Dalam konteks pemerintahan desa, prinsip tersebut menjadi penting karena pengelolaan sumber daya lokal tidak dapat dilakukan pemerintah secara sepihak, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan agar tercipta tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan.

Pentingnya kolaborasi multipihak juga sejalan dengan pandangan Noor et al.(2022) dalam buku *Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Teoritis dan*

Praktik. Mereka menegaskan bahwa *collaborative governance* merupakan proses pengelolaan yang melibatkan berbagai aktor pemerintah, masyarakat, sektor swasta, hingga organisasi non-pemerintah melalui mekanisme dialog, kesepakatan bersama, dan kerja sama yang dibangun secara berkelanjutan. Dalam model ini, pemerintah desa tidak berperan sebagai pengendali tunggal, tetapi sebagai fasilitator yang menciptakan ruang partisipatif, membangun kepercayaan, serta memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki kontribusi dan tanggung jawab yang seimbang dalam pengelolaan sumber daya publik. Perspektif ini menekankan keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh seberapa baik komunikasi yang intensif, mekanisme musyawarah, dan penguatan kapasitas antaraktor.

Jika dilihat dari sudut pandang ini, pemikiran tersebut relevan karena pengelolaan aset desa yang bersifat agribisnis, edukatif, dan wisata membutuhkan keterlibatan multipihak secara sistematis. *Collaborative governance* sebagaimana diuraikan Noor et al. (2022) menggarisbawahi perlunya struktur kolaborasi yang jelas, mekanisme koordinasi, serta komitmen bersama dalam menyusun tujuan, strategi, dan pembagian peran. Maka dari itu, kolaborasi bukan sekadar aktivitas bersama, tetapi proses terencana yang menghadirkan manfaat kolektif bagi seluruh pemangku kepentingan desa.

Namun, hasil penelitian awal menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara teori *collaborative governance* dan observasi awal di lapangan. Pengelolaan Kebun Wak Inggi masih bersifat *top-down* dengan keputusan yang terpusat pada kepala desa, tanpa adanya forum kolaboratif, mekanisme dialog multipihak, atau tim pengelola yang mewakili masyarakat dan kelompok tani.

Bahkan, pengelolaan kebun masih dilakukan oleh satu individu tanpa dukungan struktur kolaboratif yang jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip seperti *trust building*, komitmen bersama, partisipasi aktif, dan pembagian peran belum berjalan optimal. Kesenjangan antara idealitas teori dan realitas lapangan ini membentuk masalah teoretis dalam penelitian, yaitu bahwa pola kolaborasi yang seharusnya menjadi dasar tata kelola belum mampu diadopsi secara efektif oleh pemerintah desa. Ketidaksesuaian ini penting untuk diteliti lebih jauh karena menentukan keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan Kebun Wak Inggi sebagai aset desa.

Landasan hukum yang mengatur tata kelola desa secara kolaboratif telah diatur secara jelas melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, Permendagri mengenai tata kelola aset desa, serta Permendes tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Regulasi-regulasi tersebut menegaskan bahwa pemerintah desa memegang wewenang atas kewajiban hukum untuk mengelola aset desa secara partisipatif, transparan, inklusif, dan akuntabel, serta wajib membuka ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lain melalui musyawarah desa, forum pembangunan desa, dan mekanisme kerja sama lintas aktor. Dalam konteks pembangunan desa modern, kolaborasi multipihak dianggap penting untuk mengoptimalkan sumber daya lokal. Kebijakan nasional bahkan menunjukkan bahwa desa-desa yang menerapkan partisipasi aktif mengalami peningkatan pendapatan hingga 25 persen (Kementerian Desa PDTT, 2021), sehingga kolaborasi menjadi instrumen penting bagi pengelolaan aset desa seperti Kebun Wak Inggi.

Namun, kondisi normatif tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik pengelolaan Kebun Wak Inggi. Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa belum terdapat SOP (*Standard Operating Procedure*), pedoman kerja sama, atau regulasi internal desa yang mengatur secara jelas pembagian peran, mekanisme koordinasi, serta bentuk kemitraan dengan pihak luar. Tidak adanya struktur formal dan forum kolaborasi membuat proses pengelolaan cenderung berjalan secara individual, bergantung pada satu pengelola, dan tidak melibatkan masyarakat, pemuda, kelompok tani, atau perangkat desa lainnya secara optimal. Padahal, peraturan desa menuntut keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi.

Selain itu, kewajiban pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pelatihan, serta pengembangan SDM lokal juga belum terlaksana secara memadai. Dengan jumlah petani atau pekebun yang hanya mencapai 3,77% dari total penduduk, seharusnya pemerintah desa dapat menjadikan sektor agribisnis sebagai prioritas pemberdayaan. Namun, belum ditemukan program pelatihan atau pendampingan khusus yang diarahkan pada pemanfaatan Kebun Wak Inggi sebagai media pembelajaran atau wahana pengembangan agribisnis desa. Ketidaksesuaian ini menunjukkan kesenjangan nyata antara norma hukum dan praktik lapangan.

Kesenjangan normatif ini menjadi persoalan penting dalam penelitian karena memperlihatkan bahwa kewajiban pemerintah desa secara hukum tidak sepenuhnya sejalan dengan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Minimnya mekanisme kolaborasi, lemahnya kapasitas SDM, dan rendahnya partisipasi

masyarakat berdampak pada tidak optimalnya pemanfaatan Kebun Wak Inggi sebagai aset desa. Masalah ini berpotensi menghambat keberlanjutan program, efektivitas pengelolaan, serta kemampuan desa dalam membangun tata kelola yang kolaboratif sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan analisis data desa, dan penelitian awal, tampak bahwa terdapat *research gap* penting yang menjadi acuan dilakukannya penelitian ini. Pertama, sangat minim penelitian yang secara spesifik mengkaji peran pemerintah desa dalam mendorong kolaborasi multipihak pada sektor agribisnis desa, khususnya dalam konteks pengelolaan aset desa seperti kebun desa. Sebagian besar studi tentang *collaborative governance* masih bersifat umum dan berfokus pada sektor pelayanan publik, kesehatan, atau lingkungan, sehingga kajian kolaborasi dalam agribisnis desa masih kurang mendapatkan perhatian akademik.

Kedua, terdapat gap terkait rendahnya keterlibatan SDM lokal dalam pengelolaan kebun desa. Berdasarkan data Desa Parerejo (2023), hanya 3,77% penduduk bekerja sebagai petani/pekebun, sementara 25,51% penduduk termasuk kategori belum atau tidak bekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi tenaga kerja desa belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengelolaan Kebun Wak Inggi. Rendahnya partisipasi masyarakat tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan kapasitas, tetapi juga karena belum adanya struktur kolaboratif, forum partisipatif, serta program pemberdayaan berbasis kebun yang secara khusus dirancang pemerintah desa. Penelitian terdahulu belum banyak mengangkat isu ini secara kontekstual dan berbasis data lapangan.

Penelitian ini memberikan kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji secara mendalam bagaimana pemerintah Desa Parerejo menginisiasi, memfasilitasi, dan mengembangkan kolaborasi multipihak dalam pengelolaan Kebun Wak Inggi sebagai contoh konkret penerapan *collaborative governance* di tingkat desa. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang bersifat makro dan umum, penelitian ini difokuskan pada kasus spesifik agribisnis kebun desa yang mengintegrasikan aspek edukasi, ekonomi, dan wisata, sekaligus menganalisis secara langsung hambatan normatif, teoretis, dan empiris yang muncul di lapangan.

Kebaruan dalam kajian ini diharapkan diharapkan dapat mengisi celah (*gap*) penelitian sebelumnya mengenai kontribusi praktis bagi desa-desa lain yang memiliki aset serupa untuk mengoptimalkan sumber daya lokal melalui model kolaborasi yang optimal. Di samping itu, temuan ini juga dapat memperkaya literatur akademik mengenai *collaborative governance* dalam konteks desentralisasi di Indonesia, serta mendukung kebijakan nasional terkait pemberdayaan desa melalui pendekatan berbasis kasus spesifik yang dapat direplikasi atau digeneralisasikan.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat diketahui bahwa upaya kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Parerejo dalam pengelolaan Kebun Wak Inggi pada dasarnya telah berjalan dengan baik. Pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi kerja sama antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan kebun tersebut, baik dari unsur pemerintah desa, pengelola kebun, maupun beberapa kelompok masyarakat. Dalam pelaksanaannya, keterlibatan masyarakat terlihat melalui partisipasi beberapa organisasi kemasyarakatan desa seperti

Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), Karang Taruna, dan PKK yang turut berkontribusi dalam berbagai kegiatan pengelolaan dan pengembangan Kebun Wak Inggi. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat dalam proses kolaborasi tersebut masih belum mencakup seluruh elemen masyarakat desa. Partisipasi yang ada masih terbatas pada kelompok-kelompok tertentu, sehingga partisipasi masyarakat secara lebih luas dalam pengelolaan dan pengembangan Kebun Wak Inggi belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan bahwa praktik kolaborasi yang telah terbentuk masih memiliki peluang untuk terus dikembangkan agar mampu mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih menyeluruh dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan potensi desa.

Berdasarkan permasalahan, kesenjangan dan temuan penelitian tersebut, peneliti memilih untuk mengangkat judul “Proses Kolaborasi Pemerintah Desa dalam Mendorong *Collaborative Governance* (Studi Pada Pengelolaan Kebun Wak Inggi Desa Parerejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur)”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Kolaborasi Pemerintah Desa dalam Mendorong *Collaborative Governance* pada Kebun Wak Inggi?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat pada Proses Kolaborasi Pemerintah Desa dalam Mendorong *Collaborative Governance* di Kebun Wak Inggi?

1.3. Tujuan Penelitian

Rumusan Masalah yang akan dibahas, terdapat tujuan diadakannya penelitian yang harus diketahui. Berikut tujuan penelitian :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses kolaborasi pemerintah desa dalam mendorong *collaborative governance* pada Kebun Wak Inggi sebagai studi kasus di Desa Parerejo, Kabupaten Pasuruan.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada proses kolaborasi pemerintah desa dalam mendorong *collaborative governance* di Kebun Wak Inggi Desa Parerejo, Kabupaten Pasuruan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat dipetik dari pelaksanaan penelitian ini mencakup sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi Penulis

Sebagai pengetahuan bagi penulis tentang proses kolaborasi pemerintah desa dalam mendorong *collaborative governance* pada pengelolaan Kebun Wak Inggi di Desa Parerejo, Kabupaten Pasuruan, yang memperkaya pemahaman teoritis dan praktis dalam bidang *governance* dan pengelolaan sumber daya pedesaan.

- b. Bagi Mahasiswa

Sebagai pengetahuan bagi mahasiswa lain dalam memahami proses

kolaborasi pemerintah desa dalam mendorong *collaborative governance* pada pengelolaan Kebun Wak Inggi di Desa Parerejo, Kabupaten Pasuruan, sehingga dapat menjadi referensi untuk studi serupa di bidang administrasi publik atau pertanian terintegrasi.

c. Bagi Universitas Islam Malang

Sebagai literatur pendukung bagi akademisi yang berminat melakukan studi lanjutan mengenai proses kolaborasi pemerintah desa dalam mendorong *collaborative governance* pada pengelolaan Kebun Wak Inggi di Desa Parerejo, Kabupaten Pasuruan, yang berkontribusi pada pengembangan literatur akademik di universitas.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai rujukan informasi bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah, pada hakikatnya adalah dalam akuntabilitas pemerintahan dan pengelolaan sumber daya pedesaan. Serta dapat dijadikan masukan bagi pemerintah setempat untuk meningkatkan *collaborative governance* dalam pengelolaan Kebun Wak Inggi dan area serupa.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat setempat tentang pentingnya *collaborative governance* dalam pengelolaan Kebun Wak Inggi, sehingga dapat meningkatkan partisipasi, transparansi, dan keberlanjutan sumber daya untuk kesejahteraan bersama.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Kebun Wak Inggi, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Proses Kolaborasi Pemerintah Desa dalam Mendorong *Collaborative Governance* pada Pengelolaan Kebun Wak Inggi Desa Parerejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan

- a. Dialog tatap muka (*Face to Face Dialogue*)

Proses dialog tatap muka dalam pengelolaan Kebun Wak Inggi telah dilaksanakan melalui forum rapat dan koordinasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Forum tersebut melibatkan pengelola kebun, Pokdarwis, Karang Taruna, serta unsur masyarakat tertentu dalam membahas pengembangan dan pengelolaan kebun.

Dialog dilakukan secara langsung dan menghasilkan keputusan melalui musyawarah mufakat. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme kolaborasi telah berjalan sesuai prinsip *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash (2008), khususnya pada aspek *face-to-face dialogue*.

Namun demikian, partisipasi belum sepenuhnya inklusif karena tidak seluruh elemen masyarakat terlibat secara aktif dalam forum tersebut. Dengan demikian, dialog yang berlangsung telah bersifat deliberatif secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya deliberatif secara substantif.

b. Membangun kepercayaan (*Trust Building*)

Kepercayaan antar aktor dalam pengelolaan Kebun Wak Inggi dibangun melalui komunikasi yang intensif, pembagian peran yang jelas, serta penyelesaian permasalahan melalui musyawarah. Pemerintah desa memberikan ruang kepada pengelola untuk menjalankan operasional kebun, sementara tetap melakukan koordinasi dan pengawasan.

Hal ini menunjukkan adanya hubungan saling ketergantungan dan pengakuan terhadap peran aktor non-pemerintah. Meskipun demikian, kewenangan strategis tetap berada pada pemerintah desa sebagai pemegang otoritas formal, sehingga keseimbangan kekuasaan dalam kolaborasi belum sepenuhnya setara.

c. Komitmen terhadap proses (*Commitment to Process*)

Komitmen terhadap proses terlihat dari keberlanjutan forum koordinasi, keterlibatan aktor dalam kegiatan pengembangan kebun, serta adanya dukungan pemerintah desa terhadap program-program yang dirancang bersama.

Komitmen ini mencerminkan keseriusan para pihak dalam menjaga keberlanjutan kebun sebagai aset desa. Namun, tingkat partisipasi masyarakat secara luas masih perlu ditingkatkan agar komitmen kolaboratif tidak hanya terpusat pada kelompok tertentu.

d. Pemahaman bersama (*Shared Understanding*)

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman bersama dalam pengelolaan Kebun Wak Inggi terbentuk melalui proses dialog dan koordinasi yang dilakukan secara rutin antara pemerintah desa, pengelola kebun, serta kelompok masyarakat yang terlibat. Para aktor memiliki kesamaan persepsi mengenai tujuan pengelolaan kebun, yaitu sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan potensi wisata desa.

Kesamaan visi tersebut tercermin dari dukungan terhadap program-program yang disepakati bersama serta minimnya konflik terbuka dalam proses pengelolaan. Namun demikian, tingkat pemahaman bersama belum sepenuhnya merata di seluruh lapisan masyarakat karena masih terdapat warga yang belum terlibat langsung dalam forum diskusi. Oleh karena itu, pemahaman bersama telah terbentuk pada aktor inti kolaborasi, tetapi belum sepenuhnya menyebar secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat desa.

e. Dampak sementara (*Intermediate Outcomes*)

Kolaborasi dalam pengelolaan Kebun Wak Inggi telah

memberikan dampak positif berupa peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, bertambahnya kunjungan wisata, serta meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan desa.

Selain itu, kebun tersebut menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dan wadah pengembangan potensi lokal. Dampak ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* telah memberikan hasil nyata meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya.

Secara keseluruhan, *collaborative governance* dalam pengelolaan Kebun Wak Inggi telah berjalan dan menunjukkan karakter kolaboratif sesuai dengan model Ansell dan Gash (2008). Proses kolaborasi telah melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam forum formal yang berorientasi pada musyawarah dan konsensus.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Proses Kolaborasi Pemerintah Desa Dalam Mendorong *Collaborative Governance* Pada Pengelolaan Kebun Wak Inggi Desa Parerejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan kebun wak inggi dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat yang menentukan efektivitas kolaborasi antar aktor.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung utama dalam *collaborative governance* meliputi:

1. Dukungan Pemerintah Desa sebagai fasilitator utama yang menginisiasi forum kolaborasi serta memberikan legitimasi terhadap pengelolaan kebun.
2. Adanya komunikasi dan dialog tatap muka secara rutin, yang memungkinkan terbangunnya koordinasi dan kesepahaman antar pihak.
3. Partisipasi aktor non-pemerintah, seperti Pokdarwis, Karang Taruna, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan kebun.
4. Kesamaan visi dan tujuan, yaitu menjadikan Kebun Wak Inggi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dan pengembangan potensi wisata desa.
5. Potensi sumber daya alam dan daya tarik wisata, yang menjadi modal sosial dan ekonomi dalam pengembangan kebun.

Faktor-faktor tersebut memperkuat proses kolaborasi karena menciptakan kondisi yang mendukung terbentuknya kepercayaan, komitmen, dan kerja sama antar aktor.

b. Faktor penghambat

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan *collaborative governance* antara lain:

1. Partisipasi masyarakat yang belum merata, sehingga tidak semua kelompok masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan.
2. Keterbatasan sumber daya manusia, terutama dalam hal manajemen dan pengembangan wisata.
3. Dominasi kewenangan pemerintah desa dalam keputusan strategis, sehingga keseimbangan kekuasaan belum sepenuhnya setara.
4. Keterbatasan sarana dan prasarana*, yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan kebun.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa meskipun *collaborative governance* telah berjalan, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penguatan pada aspek inklusivitas, kapasitas, dan pemerataan partisipasi.

Dengan demikian, *collaborative governance* dalam pengelolaan Kebun Wak Inggi didukung oleh adanya komitmen pemerintah desa, komunikasi yang terbangun, partisipasi aktor non-pemerintah, serta potensi sumber daya lokal. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan partisipasi masyarakat secara menyeluruh, ketimpangan distribusi kewenangan, dan keterbatasan kapasitas sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan dan perluasan partisipasi agar kolaborasi dapat berjalan lebih efektif dan deliberatif.

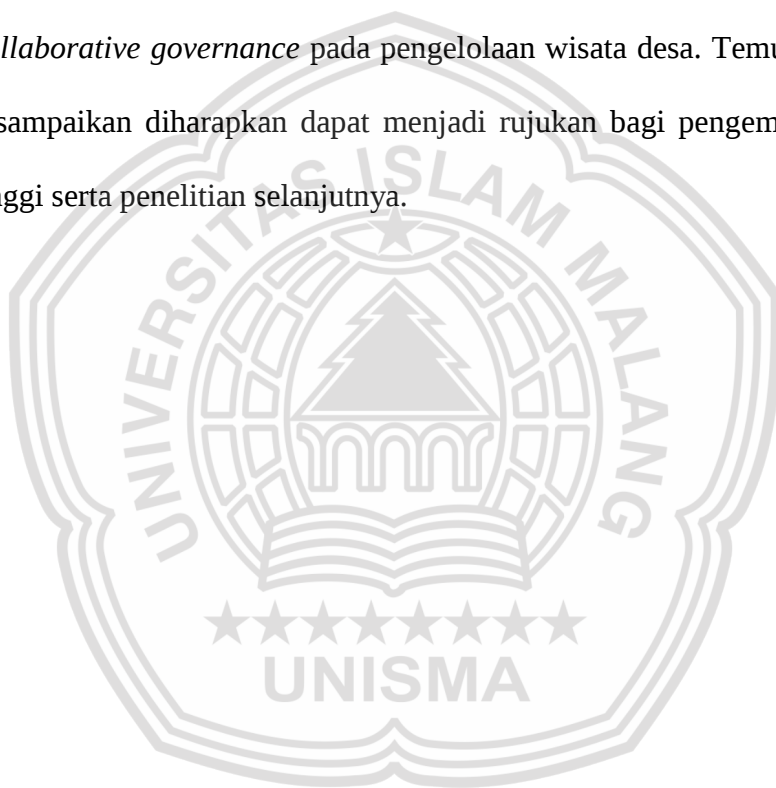
6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Parerejo, disarankan untuk memperkuat mekanisme kolaborasi melalui pembentukan forum kolaboratif yang lebih terstruktur dan inklusif, sehingga dialog antar aktor tidak hanya bersifat koordinatif, tetapi juga deliberatif. Selain itu, pelembagaan kepercayaan melalui kesepakatan tertulis atau regulasi desa dapat menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan kolaborasi, terutama dalam menghadapi perubahan kepemimpinan desa.
2. Bagi Pengelola Kebun Wak Inggi, disarankan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan inovasi pengelolaan, khususnya dalam aspek promosi wisata dan pengembangan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara lebih luas. Pengelola juga perlu memperkuat komunikasi dengan masyarakat agar pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan kebun dapat merata.
3. Bagi Masyarakat Desa Parerejo, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam pengelolaan Kebun Wak Inggi, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai bagian dari proses kolaborasi yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat secara aktif dapat memperkuat legitimasi dan keberhasilan pengelolaan wisata desa.
4. Bagi Penelitian Selanjutnya, disarankan untuk mengkaji proses *collaborative governance* pada pengelolaan wisata desa dengan cakupan

waktu yang lebih panjang atau dengan membandingkan beberapa desa, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi di tingkat desa.

Dengan demikian, Bab VI ini menegaskan kembali bahwa penelitian telah mencapai tujuan yang ditetapkan dan memberikan kontribusi baik secara praktis maupun akademis dalam memahami proses kolaborasi pemerintah desa dalam mendorong *collaborative governance* pada pengelolaan wisata desa. Temuan dan saran yang disampaikan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan Kebun Wak Inggis serta penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Artikel

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Husna, N. U., Putera, R. E., & Aromatica, D. (2025). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA LIMA PULUH KOTA. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 9, 63–76.
- Mufti, A. A., Anadza, H., & Sekarsari, R. W. (2023). EVALUASI COLLABORATIVE GOVERNANCE PEMERINTAH DESA TUMPANG (Studi Pada Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah Batik Selo Putri Dalam Program One Village One Product). *Jurnal Respon Publik*, 17(8), 80–91.
- Ode, L., & Islamy, S. (2022). PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE COLLABORATIVE GOVERNANCE PROCESS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(April).
- Rochmatin, L., Muchsin, S., & Sunariyanto. (2025). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESA WISATA KERTOSARI. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16.
- Silviana, A., Cikusin, Y., & Abidin, A. Z. (2022). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT TANI DI DESA NAJARSARI KECAMATAN BANDARKEDUNG MULYO KABUPATEN JOMBANG. *Jurnal Respon Publik*, 16(6), 28–35.
- Utami, A. D. M., Hariani, D., & Sulandari, S. (2021). *Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul ,.*
- Yudanto, A. A., Solikin, A., & Windani, I. (2024). Collaborative Governance to

achieve Village SDGs : A Case Study of Irrigation Systems in Krandegan Village. *INOBIIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 07(1), 535–550.

Buku

Terry, George R. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.

Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *COLLABORATIVE GOVERNANCE Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik* (M. R. Firdaus & F. Z. Yopiannor (ed.); Cetakan Pe). BILDUNG. www.penerbitbildung.com

Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015). *PEMERINTAHAN DESA* (Y. Munaf (ed.)). NUSA MEDIA Yogyakarta.

Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D* (Cetakan ke). ALFABETA, CV.

Regulasi

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa*.

Kementerian Desa PDTT. (2021). *Laporan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*.

Dokumen

Pemerintah Desa Parerejo. (2024). *Profil Desa Parerejo dan Dokumen Perencanaan Kebun Wak Ingg*. Parerejo.com.